

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Krisdyawati et. al (2018) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang” terhadap mitigasi kekerasan atas wanita dan anak-anak. Berdasarkan temuan studi, respons Kota Semarang terhadap insiden kekerasan terhadap anak, secara umum, efisien, bahkan mungkin belum mencapai kondisi terbaiknya. Hal ini disebabkan karena masih banyak ditemukan korban kekerasan di Kota Semarang dan peristiwa kekerasan di sana masih cukup rawan. Mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, mengakhiri tindak kekerasan, dan memberikan kenyamanan pada anak merupakan tujuan utama penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Ada sejumlah variabel yang mungkin mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Penulis mempertimbangkan dua unsur utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak di Kota Semarang: faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Silap C et al., (2019) meneliti tentang peran DPPPA Kota Manado dalam menangani fenomena kekerasan pada wanita. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. menyimpulkan bahwa dalam menyikapi fenomena kekerasan yang dialami wanita, DPPPA menawarkan atau memberikan dukungan kepada korban kekerasan, termasuk advokasi, layanan, dan perawatan kesehatan gratis. Selain itu, korban kekerasan terhadap perempuan dapat memperoleh bantuan dari pekerja sosial, pendeta, dan psikolog melalui DPPPA Kota Manado. Selain itu, karena terlaksananya program tersebut telah sesuai dengan anggaran DPPPA Kota Manado yang bersumber dari APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Camilla Tuharea dkk. (2021) bertajuk “Efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku” menyimpulkan bahwa dinas tersebut belum melaksanakan adaptasi dan belum efektif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan kurangnya *shelter* bagi korban pelecehan untuk mendukung program. Oleh karena itu, pemerintah berdedikasi untuk melakukan kronologi dan penjelasan yang diperlukan, menyerahkannya kepada polisi, dan memberikan dukungan. Dilain sisi, para korban mungkin mendapatkan terapi dan perumahan yang aman untuk membantu mereka mengatasi trauma mereka. Selain itu, pelaporan peristiwa kekerasan dapat dilakukan melalui SIMFONI-PPA. Sistem ini diasumsikan mampu membantu korban kekerasan secara komprehensif untuk mendokumentasikan serta melaporkan pengalaman mereka, dan juga berfungsi sebagai sumber daya di Maluku untuk memberdayakan wanita.

Kajian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kekuasaan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dilakukan oleh Melsi Syawitri dan Afdal. Berdasarkan penelitian ini, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga, yang sering dilakukan oleh kepala rumah tangga karena adanya hubungan kekuasaan yang hierarkis, kesenjangan, atau rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap orang lain untuk menjunjung tinggi status sosial, yang tidak diimbangi dengan keadaan sebenarnya untuk memenuhi harapan tersebut. Selain itu, pengaruh budaya, pengetahuan, atau tingkat sumber daya manusia dalam rumah tangga, serta permasalahan yang paling umum berupa masalah ekonomi yang berujung pada perebutan kekuasaan antara satu pihak dan semuanya berkontribusi terhadap dukungan ini. Dalam penelitian ini, kami mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh fakta bahwa pakaian anak tidak sesuai dengan preferensi pelaku. Pelaku yang cukup kesal memukul istrinya dengan balok kayu hingga tewas. Dalam kasus ini, pelaku mendapat hukuman 16 tahun penjara, sedangkan hak asuh anak tetap berada di tangan keluarga istri. (Syawitri & Afdal, 2020).

Ayu Setyaningrum melakukan penelitian dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

Khususnya Anak dan Perempuan”. Dalam publikasi ini, para ahli membahas bagaimana KDRT berdampak ibu dan anaknya. Misalnya contoh adanya ibu yang membunuh ketiga anaknya karena pelaku tidak sanggup lagi menanggung permasalahan rumah tangganya; bahkan setelah membunuh ketiga anaknya dengan alat bantu pernapasan, dia akan bunuh diri dengan meminum racun dan mengoleskannya ke tubuhnya. Namun, salah satu anggota keluarga yang menyaksikan aktivitas tersebut turun tangan dan korban selamat dari aksi bunuh diri tersebut (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Penelitian berjudul “*Mental health of women and children experiencing family violence in conflict settings: a mixed methods systematic review*” yang ditulis oleh (Silap C et al., 2019) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan kekerasan keluarga yang dilaporkan selama atau hingga 10 tahun setelah konflik memenuhi syarat untuk dimasukkan. Dua puluh satu penelitian dilakukan kuantitatif, mengukur prevalensi dan hubungan antara kekerasan keluarga dan masalah kesehatan mental. Secara umum, laporan-laporan tersebut berkualitas tinggi dan semuanya melaporkan prevalensi kekerasan yang tinggi. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebagian besar berada pada kisaran 30–40%, prevalensi kekerasan fisik tertinggi yang dilaporkan adalah 78,9% di Bosnia dan Herzegovina. Untuk kekerasan terhadap anak, lebih dari tiga perempatnya pernah mengalami kekerasan, angka tertinggi yang pernah dialami menjadi 95,6% di Sri Lanka. Ditemukan hubungan dengan sejumlah masalah kesehatan mental, khususnya gangguan stres pasca trauma dan resikonya bervariasi di berbagai lokasi. Delapan studi kualitatif menunjukkan bagaimana pengalaman laki-laki konflik, termasuk tekanan keuangan, berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penelitian “*Examining intersections between violence against women and violence against children: perspectives of adolescents and adults in displaced Colombian communities*” yang ditulis oleh (Mootz et al., 2019) menggunakan metode penelitian analisis tematik induktif dan menempatkan analisis tersebut dalam kerangka sosioekologis feminis,

kami menemukan beberapa penyebab kekerasan rumah tangga yang sama. Persimpangan antar pengemudi di semua tingkat sosioekologisterjadi di antara norma-norma gender masyarakat, penggunaan narkoba, upaya untuk mengatur perilaku perempuan dan anak-anak. Proses relokasi dan perpindahan menyebabkan kerentanan baru dan ketidakstabilan yang berkelanjutan dalam struktur keluarga, khususnya melalui pemicu stres masyarakat perkotaan termasuk keselamatan, kerawanan ekonomi dan pangan, serta peningkatan akses terhadap zat. Secara kolektif, temuan-temuan ini mendukung intervensi yang secara sistematis mempertimbangkan perjuangan keluarga dalam menghadapi relokasi dan kekerasan, dengan perhatian beragam pada isu-isu yang berkaitan dengan relokasi dan kekerasan.

Penelitian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang ditulis oleh (Chang et al., 2022) dengan judul “*The characteristics of husbands and violence against women in Wuhan, China: a cross-sectional study*” menggunakan metode penelitian *cross-sectional*. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita yang suaminya berpendidikan rendah, melakukan pekerjaan kasar, dan pecandu alkohol jangka panjang peminum, kelebihan berat badan atau obesitas, dan bersifat jangka panjang perokok rentan dan penyakit DV seumur hidup. Wanita dengan lebih banyak suami yang berpendidikan mempunyai risiko lebih rendah menderita penyakit ini DV seumur hidup, temuan yang konsisten dengan sebelumnya menurunkan tingkat pendidikan suami, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan kekerasan untuk memecahkan masalah. Biasanya tingkat budayanya rendah atas nama rendahnya status sosial dan ekonomi suami. Semua faktor ini dengan mudah menyebabkan kekerasan dalam keluarga.

Kajian “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Stunting” oleh Azahra et al., (2023) menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Berdasarkan temuan penelitiannya, agar strategi komunikasi pemerintah dapat berfungsi dengan baik maka perlu dilakukan empat strategi dengan empat fokus utama yaitu mengidentifikasi sasaran komunikasi, dimana sasaran komunikasi diperlukan untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran komunikasi. komunikasi yang terjalin, dan dimana target komunikasi dapat ditentukan sejalan dengan tujuannya. Agar

komunikasi yang terjalin dapat diterima dengan baik, pemilihan media komunikasi didefinisikan sebagai media yang diperuntukkan sebagai penyampai informasi pada orang lain, menilai arah pesan tersebut, yang dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan yang terlibat untuk sepakat untuk mengembangkan percepatan mitigasi stunting berdasarkan kondisional di daerah, dan peran komunikator dengan komunikator, dimana peran komunikator.

Komunikasi pemerintah daerah melalui penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini ditulis oleh (A Widodo, Febriany, 2021) membawakan sejumlah konklusi berupa: pertama, pemerintah, baik tingkat federal, provinsi, maupun kabupaten, memilih rencana komunikasi yang tepat untuk memerangi kemiskinan di Kebumen dengan memanfaatkan media sosial dan situs web yang dimiliki oleh otoritas atau lembaga terkait. Kedua, di era digital, saluran komunikasi pemerintah harus dikelola secara terintegrasi sehingga menumbuhkan sinergi dan kolaborasi antar kantor atau organisasi. Ketiga, dengan fokus pada aktor, media, dan dampak yang dihasilkan, strategi komunikasinya juga bersifat partisipatif karena melibatkan masyarakat dalam interaksi langsung. Hal ini melibatkan keterlibatan otoritas pusat untuk mengkomunikasikan upaya pengentasan kemiskinan di Kebumen secara langsung kepada masyarakat, diikuti oleh PemProv Jateng dan PemKab Kebumen melalui bupati atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat” yang ditulis oleh (Febriani & Juliani, 2022) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif membawakan konklusi berupa mekanisme pelayanan informasi/data publik yang dilaksanakan PPID cukup baik dan memuaskan dalam hal strategi sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat memanfaatkan teknologi informasi online yang memadai sebagai fasilitas layanan untuk memudahkan dan mempercepat akses data berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Informasi Gampong (KIG), yang bertujuan untuk

meningkatkan media massa, teknologi informasi, dan literasi industri serta memfasilitasi penciptaan saluran data yang efektif oleh masyarakat setempat untuk mengatasi hambatan informasi.

Penelitian dengan judul “Komunikasi Pemerintah Kota Medan Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat” yang ditulis oleh (M. Agha Novrians & Mailin, 2020) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana memiliki kesimpulan bahwa komunikasi yang dijalin pemerintah Kota Medan ialah melalui pelatihan ketenagakerjaan, seminar, inisiatif penjangkauan, dan dikeluarkannya peraturan daerah; Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, prostitusi juga semakin marak di media sosial. Dalam upaya memberantas prostitusi di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan individu, seperti Satpol PP, Ormas Islam, dan kepolisian, melakukan penggerebekan dan penutupan tempat-tempat tersebut.

Penelitian oleh (Istiyanto, 2021) dengan judul penelitiannya “Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diketahui bahwa komunikasi pemerintah dalam pembangunan telah berhasil menciptakan program pemulihan ekonomi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, meskipun masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi penanganan pemulihan. lokasi wisata Pantai Ciamis Pangandaran. Tahap perencanaannya jauh berbeda dengan destinasi wisata populer Pantai Widara Payung, Cilacap, dan Pantai Parangtritis, Bantul, meski tidak lagi terlibat dalam tahap pelaksanaan dan penilaian.

Kajian “Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Dalam Memasyarakatkan Gerakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Bagi Masyarakat” (Rahman & Sjoraida, 2017) menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa praktisi humas pemerintah atau lembaga humas menangani fungsi manajemen di bidang informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, dan persuasif dalam rangka membangun hubungan. Begitulah cara pemerintah mengkomunikasikan program Gerakan Pembangunan

untuk Rakyat kepada masyarakat melalui hierarki pemerintahan. yang bekerja selaras dengan masyarakat melalui berbagai teknik humas untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap instansi pemerintah atau melalui sistem pertukaran publik, dimana beliau memberikan pemahaman kepada seluruh SKPD, SEKDA, kepala dinas, kepala desa, dan camat. program ini sehingga mereka dapat mempromosikannya kepada masyarakat pada kesempatan yang berbeda atau pada acara yang berbeda. Hal ini menjadi tanggung jawab humas pemerintah yang berada di bawah pelayanan INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Subang, namun Bupati menghimbau kepada seluruh SKPD dan pejabat pemerintah lainnya untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat di berbagai kesempatan yang ada saat ini.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Buluamang & Handika, 2018) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tentang “Komunikasi Pemerintah Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)” menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait komunikasi pemerintah antar perangkat daerah di bawah naungan Pemerintahan. lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam hal pengembangan pariwisata. dengan aspek relasional, faktor komunikasi, dan modalitas komunikasi dalam komunikasi korporat. Selain itu, proses komunikasi yang berkesinambungan menonjolkan aspek interaksi posisi dan atasan-bawahan dalam proses komunikasi dari sudut pandang dimensi relasional dalam komunikasi pemerintahan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Komunikasi Pemerintah

Menurut Malone, komunikasi pemerintah adalah suatu jenis dialog yang terjadi dalam lembaga pemerintah antar pihak terkait. Komunikasi pemerintahan dilakukan melalui koneksi atau jaringan yang terhubung satu sama lain sesuai dengan peraturan resmi yang telah ditetapkan. Komunikasi pemerintah mengenai apa yang diterima dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pertukaran konsep, arahan, atau sentimen terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah.

a. Pengertian Komunikasi

Mulyana (2007) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha menyampaikan pesan guna menciptakan pemahaman. Widjaja (2008) mengartikan komunikasi sebagai aktivitas interpersonal dimana orang-orang bertukar simbol-simbol yang mempunyai arti penting bagi mereka berdasarkan kepentingan mereka. Menurut Susan (2003), komunikasi adalah proses dimana seseorang menginformasikan atau memodifikasi sikap, ide, atau perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi tertulis melalui media. Fondasi dari semua hubungan sosial adalah komunikasi. Sebagai makhluk sosial dan individu, manusia memiliki keinginan alami untuk belajar dan maju, dan komunikasi merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Meskipun berbicara itu sederhana, komunikasi yang efektif tidak selalu mudah. Berbicara tidak menjamin bahwa apa yang diungkapkan akan dimengerti.

Salah satu aktivitas manusia mendasar yang mungkin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi. Orang-orang terlibat dalam komunikasi setiap hari; itu adalah aspek keberadaan yang sangat penting. Komunikasi adalah langkah pertama menuju perluasan pemahaman manusia. Selain itu, saling mendukung juga diperlukan agar sistem komunikasi sosial dapat terus berjalan tanpa hambatan di masyarakat. Sebaliknya ditegaskan bahwa komunikasi adalah tindakan partisipan dalam suatu proses informasi menghubungkan dan bertukar informasi satu sama lain. Hal senada juga diungkapkan oleh (Siporin, 2017) yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran informasi antara dua individu atau lebih. Proses ini mencakup tindakan penyampaian dan penerimaan pesan, serta membalas pesan antar individu yang berinteraksi.

Komunikasi adalah proses mengkomunikasikan ide, emosi, dan perasaan dengan orang lain. Itu terjadi dalam berbagai keadaan, termasuk komunikasi pribadi, antarpribadi, kelompok, dan massa.

Komunikasi juga terjadi dalam berbagai bidang, antara lain bidang korporat, secara tradisional, politik, dan seluruh bidang lainnya. Proses komunikasi di berbagai latar dan bidang tidaklah otomatis dan memerlukan beberapa keputusan, termasuk apa yang akan dikatakan dan bagaimana mengatakannya, saluran komunikasi mana yang akan digunakan, kualitas komunikator dan pendengar, serta skenarionya.

Dalam jargon komunikasi, seseorang yang menyampaikan isi gagasan dan/atau perasaannya disebut “komunikator”, menyampaikan sejumlah informasi kepada “komunikan”. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi kedua belah pihak belum membuahkan hasil yang diinginkan, atau dalam terminologi komunikasi disebut dengan situasi non-komunikatif. Dengan kata lain, komunikasi tersebut telah gagal menemukan makna yang diinginkan.

b. Tujuan Komunikasi

(Mulyana 2007) Tujuan komunikasi antara lain memberikan informasi, bersifat persuasif (membangkitkan sentimen), mempengaruhi perilaku, mengubah pandangan atau opini, mendorong keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan kekayaan. Tujuan komunikasi pembangunan diperkirakan akan menghasilkan transformasi masyarakat atau sosial. Menurut Widjaja (2008), komunikasi pembangunan di Indonesia mempunyai tujuan dasar yang bersifat pragmatis, yaitu suatu pola yang menciptakan inovasi untuk masa kini dan masa depan.

c. Bentuk-Bentuk Komunikasi

(Matroni, 2008) mengklasifikasikan bentuk dari komunikasi, berupa:

a. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal disebut juga komunikasi intrapersonal, yang diterjemahkan menjadi “komunikasi dengan diri sendiri”.

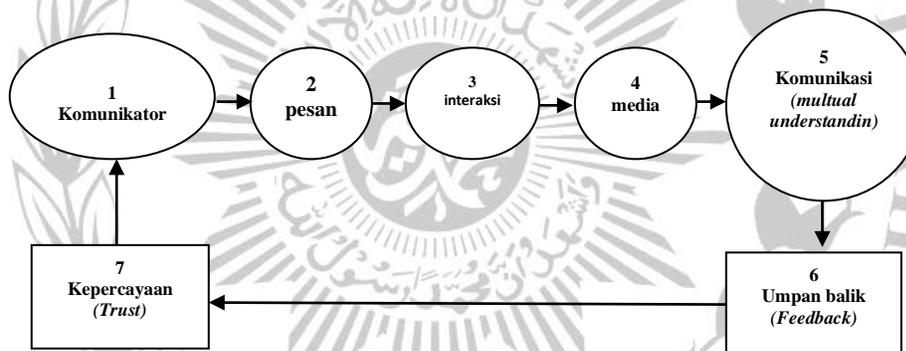
Komunikasi dalam diri individu ini berperan sebagai:

1. Mengembangkan imajinasi kreatif, kesadaran dan pengendalian diri, serta kematangan mental sebelum mengambil keputusan.
2. Membuat seseorang terjaga dengan fenomena lingkungannya.

b. Komunikasi Interpersonal

Menurut Indah (2009) model komunikasi tersebut berupa percakapan yang dilakukan dengan melibatkan adanya sentuhan secara langsung oleh dua individu, yang dapat dilakukan dengan bertatapmuka maupun melalui media, dengan tolak ukur efektivitas berupa adanya ekspresi yang berubah dari para aktor dalam komunikasi.

d. Unsur-unsur Komunikasi



Pengirim (sumber) bertindak sebagai komunikator, penyandi pesan yang akan disampaikan secara langsung atau melalui media komunikasi. Ketika pesan disampaikan, pemahaman datang dari penerimanya, dan pasangan dituntut untuk membangun saling pengertian antar penerima pesan melalui sejumlah kode komunikasi seperti bahasa lisan, tulisan, gerak tubuh, atau media. Pesan yang dikodekan kemudian akan menawarkan umpan balik atas pesan yang diterima, dengan tujuan pada akhirnya membentuk siklus kepercayaan yang dapat disaksikan dan dikenali melalui bangkitnya kepercayaan komunikasi terhadap komunikator.

Sebagaimana definisi tersebut, awalan proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator perlu menyesuaikan logika dan informasi yang dimilikinya. Berbeda dengan penggunaan media komunikasi seperti telepon, fax, email, telepon genggam, dan sebagainya; pertama, komunikator harus menjamin bahwa komunikasi dapat memanfaatkan sarana komunikasi secara efektif guna mengoptimalkan tujuan komunikasi. Meskipun komponen media ini bersifat perangkat lunak, namun dapat menyebabkan kegagalan komunikasi, seperti ketidakmampuan berinteraksi dengan ponsel cerdas selama pengoperasian layanan pesan singkat (SMS).

e. Pengertian Pemerintah

Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019), pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan yang signifikan dalam suatu negara, mengawasi urusan komunal, wilayah, dan kekuasaan dalam rangka memenuhi tujuan negara. Nisjar mengartikan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan yang diselenggarakan pemerintah (Astomo, 2014). Konsep pemerintahan ini bersifat komprehensif karena seluruh penyelenggaraan pemerintahan dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Proses ini mencakup tanggung jawab institusi polisi militer dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan untuk kepentingan bangsa.

Said mengartikan pemerintahan sebagai segala tindakan, tanggung jawab, dengan target menyelesaikan cita-cita bangsa oleh lembaga eksekutif. Sementara itu, secara lebih umum, pemerintah dapat diartikan sebagai sebuah langkah ataupun tindakan yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir dengan sumber kekuatan berupa cita-cita bangsa. Selain itu, dari sudut pandang lainnya, definisi dari pemerintahan berupa sebuah upaya meraih tujuan bernegara yang dilaksanakan dalam sebuah sistem dengan sutruktur yang tetrtata secara

baik dengan dukungan sejumlah organisasi (Suwari Akhmaddhian, 2015).

Sementara itu, Josef percaya bahwa pemerintahan dan pemerintahan terbentuk sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai fungsi operasional untuk mencapai cita-cita bangsa yang tidak tampak dan tidak terdefinitif dalam kerangka hukum. Sejumlah peran ini mungkin ditinjau serta diimplementasikan dengan variatif yang berbeda yang menyesuaikan kondisi ideologis dimasing-masing tempat. Kondisi tersebut tercermin dalam adanya perbedaan gaya pemerintahan. Menurut Suyuti, hal tersebut lebih khusus tercermin pada dua kutub ekstrim sistem totaliter (kekuasaan yang tersebar). Konsekuensi perpindahan kekuasaan (Noviati, 2016).

f. Pengertian Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah adalah pertukaran informasi, ide, sentimen, dan sikap antara pejabat pemerintah untuk internal dan eksternal organisasi, atau sebaliknya. Komunikasi dalam kehidupan organisasi (pemerintahan) terbagi menjadi dua jenis yaitu komunikasi internal dan komunikasi luar. Komunikasi pemerintah mengacu pada komunikasi manusia yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Akibatnya, komunikasi pemerintah terkait erat dengan komunikasi organisasi dan merupakan aspek integral di dalamnya. Pesan dikirim dan diterima melalui jaringan yang interaksinya didasarkan pada aturan eksplisit.

Pesan yang dikirimkan dan diterima tidak hanya terbatas pada fakta saja, namun mencakup pula penyampaian gagasan (sharing ideas), instruksi (instruction), dan perasaan (feeling) terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah. Birokrat pemerintah menggunakan komunikasi pemerintah untuk berbagi informasi, gagasan, perasaan, dan sikap dengan peserta komunikasi lainnya yang disebut komunikan, termasuk pejabat pemerintah untuk organisasi internal dan dunia usaha,

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk organisasi eksternal, dan sebaliknya (Silalahi, 2014).

2.2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

a. Perempuan

Pemahaman tentang peran perempuan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan fisik dan psikologis. Hal ini didasarkan pada struktur biologis, perkembangan kimia, dan komposisi tubuh manusia dari sudut pandang fisik. Berbeda dengan sudut pandang psikologis yang berpijak pada sifat, gender, atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikologi atau gender dicirikan sebagai ciri-ciri feminin yang merupakan bawaan dalam diri seseorang. Perempuan merupakan salah satu jenis kelamin yang dibedakan berdasarkan alat reproduksinya, antara lain rahim, sel telur, dan payudara, sehingga memungkinkan perempuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Perempuan diartikan sebagai suatu jenis kelamin (orang) yang mempunyai vagina, biasanya sedang menstruasi, sedang hamil, melahirkan anak, atau sedang menyusui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, wanita dewasa biasanya disebut sebagai “wanita”.

Nugroho menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, sel telur, vagina, dan alat laktasi yang seluruhnya disediakan secara biologis atau kadang disebut sebagai perbekalan alam (Tuhan). Perempuan diartikan sebagai individu yang memiliki penampilan menarik, sifat keibuan, telah mencapai usia dewasa, kematangan emosi, dan sifat feminin, sesuai dengan kriteria yang diberikan di atas (Fasya, M Fahri; Karwati, Lilis; Herwina, 2022).

b. Anak

Anak-anak mewakili nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di masa depan, yang penting bagi pertumbuhan berkelanjutan negara ini. Berangkat dari pengertian tersebut maka

pertumbuhan dan perkembangan anak perlu mendapat perhatian utama. Anak perlu mendapat kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berkembang secara fisik, kognitif, dan spiritual. Demi menjaga martabat manusia, anak-anak harus diberikan hak-haknya, dilindungi, dan mempunyai akses yang sama terhadap peluang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menghentikan dan memberantas sepenuhnya segala jenis kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan definisi yang tertuang dalam KBBI, anak didefinisikan sebagai seorang individu yang belum mencapai kedewasaan yang dalam konsep ini belum genap berusia 18, meskipun terdapat pengecualian bagi mereka yang mencapai kedewasaan lebih awal dan konsep tersebut sejalan dengan yang diutarakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

R.A Koesnan berpendapat bahwa anak adalah generasi muda, baik dari segi usia, semangat, dan pengalaman hidup, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran peraturan perundang-undangan, yaitu mereka dengan usia yang belum genap 18, belum pernah menikah dan bahkan masih dalam kandungan. Perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki pendekatan yang baku dalam mendefinisikan kategori usia anak, meskipun masing-masing variasi mempunyai arti yang sama berdasarkan konteks dan kondisi di mana perspektif tersebut akan diterapkan nantinya.

c. Perempuan Korban Kekerasan

Kekerasan sering digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan cedera atau penderitaan secara fisik, seksual, finansial, atau psikologis. Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi di rumah yang dimaksudkan untuk memberikan rasa perlindungan dan kenyamanan. Kasus-kasus viktimisasi yang melibatkan perempuan menekankan betapa pentingnya

status perempuan jika menyangkut tindakan menyakiti diri sendiri. Fakta bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan belum dikriminalisasi seperti aktivitas kriminal, namun masih dianggap sebagai kejadian biasa, merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan.

Mungkin masih ada anggapan bahwa perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap diskriminasi baik di ranah privat maupun publik. Pengertian kekerasan dalam Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagai berikut: kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan pada korban baik secara fisik, seksual, ekonomi, atau secara psikologis.

Wanita dan anak kecil yang menderita maupun sampai dengan meninggal akibat kekerasan merupakan korban berdasarkan undang-undang ini. Definisi ini membawa pada kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai setiap perbuatan yang merugikan kesejahteraan tubuh, seksual, mental, dan/atau finansial korbannya.

d. Kekerasan Terhadap Anak

Ketika adanya individu dengan usia belum genap 18 tahun dirugikan secara finansial, psikologis, atau fisik, hal itu dianggap sebagai kekerasan terhadap anak di bawah umur. Campbell & Humphrey mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap perilaku merugikan yang diterima oleh individu yang pada dasarnya dierikan kesejahteraan oleh pelaku. Kekerasan terhadap anak, dalam kata-kata Ricard J. Gelles, diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja yang menempatkan anak pada risiko atau cedera, baik secara fisik maupun emosional. Ada beberapa penyebab terjadinya peristiwa kekerasan yang mengakibatkan anak menjadi korban, seperti:

1. Faktor yang berhubungan dengan orang tua atau keluarga
Orang tua lebih rentan melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anaknya. Agresi orang tua terhadap anak-anaknya

dapat disebabkan oleh masalah kesehatan mental serta kurangnya kematangan fisik, emosional, atau sosial. khususnya mereka yang menjadi orang tua sebelum berusia 20 tahun.

2. Unsur sosial atau kemasyarakatan lingkungan. Salah satu hal yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak adalah lingkungan. Keadaan sosial ekonomi yang rendah, kemiskinan, dan besarnya dukungan sosial dalam suatu komunitas dapat berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak.
3. Anak muda itu sendiri dan faktor-faktornya. Kelainan perkembangan dan perilaku menyimpang pada anak merupakan dua faktor yang berkontribusi terhadap seringnya terjadinya kekerasan pada anak. Kekerasan berpotensi merampas hal-hal paling mendasar dalam hidup anak dan, pada gilirannya, berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari. Contoh item ini meliputi:
 - a. Cacat pertumbuhan yang bersifat permanen
 - b. Kesulitan belajar
 - c. Kelainan emosi bahkan dapat menyebabkan gangguan kepribadian
 - d. Ketidakmampuan untuk mencintai atau mempercayai orang lain
 - e. Agresif dan sering kali mampu melakukan kejahatan
 - f. Sebagai seorang anak, dia berkembang menjadi seorang pengganggu
 - g. Dia menggunakan narkoba
 - h. Dia meninggal

Menurut Terry E. Lawson dalam (Muthmainnah, 2015), terdapat empat bentuk utama kekerasan terhadap anak, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik diartikan sebagai penganiayaan yang diwujudkan pemukulan, menyiksa, serta menganiaya anak secara sengaja dengan memanfaatkan hal-hal tertentu yang melukai atau bahkan membunuh mereka.
2. Kekerasan psikologis atau emosional mengacu pada tindakan yang menyebabkan tekanan emosional pada anak, seperti menghina, mempermalukan, atau menimbulkan perasaan terluka. Seorang anak muda mungkin menjadi sasaran tindakan pelecehan emosional secara verbal atau fisik. Secara verbal, tindakan tersebut bisa berupa membentak, mengancam, atau menggunakan bahasa yang menghina anak. Sebaliknya, sikap-sikap tersebut bisa berupa menolak kehadiran anak, menolak memeluk atau mencium anak, mengabaikan anak, dan sangat membatasi hubungan sosial anak.
3. Kekerasan seksual dapat berupa anak yang dipaksa untuk melakukan kontak seksual dengan orang dewasa, serta bentuk pro dan kontra seksual lainnya yang menggunakan kata-kata, sentuhan, gambar, atau visual.
4. Pengabaian serta pemanfaatan anak-anak secara berlebihan merupakan contoh fenomena sosial yang terkategori sebagai kekerasan. Jika model pengasuhan yang diberikan orang tua yang diperlukan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya, hal ini dianggap sebagai perilaku yang menelantarkan anak. Seorang anak yang terkucilkan, terasingkan, serta tidak memperoleh edukasi ataupun perhatian medis yang diperlukan adalah beberapa contoh perilaku penelantaran anak. Sebaliknya, sikap atau perlakuan

kasar terhadap anak oleh orang dewasa disebut sebagai eksploitasi anak. Misalnya, menekan anak-anak atas nama tujuan ekonomi, sosial, atau politik untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan dan mengabaikan hak mereka atas pengasuhan dan perlindungan berdasarkan status sosial, tahap perkembangan, dan kebutuhan psikologis mereka.

Berdasarkan beberapa konsepsi tentang kekerasan Berdasarkan saran para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengajarkan kekerasan kepada anak adalah tindakan yang salah karena berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten harus mengoordinasikan peraturan masing-masing dalam rangka mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.

